

## ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP KEBIJAKAN KREDIT USAHA (KUR) PADA BANK BRI

Rusmiati<sup>1</sup>, Giska Novalinda<sup>2</sup>, Titin Gustiani<sup>3</sup>, Imam Asrori<sup>4</sup>

[rusmiati1268@gmail.com](mailto:rusmiati1268@gmail.com)<sup>1</sup>, [giskanovalinda891@gmail.com](mailto:giskanovalinda891@gmail.com)<sup>2</sup>, [titingustiani584@gmail.com](mailto:titingustiani584@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ia8167275@gmail.com](mailto:ia8167275@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Nurul Huda

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). UMKM memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia, namun kerap mengalami hambatan dalam akses pembiayaan. Program KUR hadir sebagai solusi dari pemerintah untuk memperluas akses kredit bagi pelaku UMKM yang layak namun belum bankable. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dan sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR BRI dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya, serta memberikan dampak sosial yang signifikan, khususnya pasca pandemi. Temuan juga menunjukkan bahwa program KUR memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi UMKM terhadap proses dan manfaat KUR serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaannya untuk menjamin efektivitas program.

**Kata Kunci:** UMKM, Kredit Usaha Rakyat, Bank BRI, Pembiayaan, Kesejahteraan, Kebijakan Pemerintah

### ABSTRAK

This study aims to analyze the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) toward the People's Business Credit (KUR) policy distributed through Bank Rakyat Indonesia (BRI). MSMEs play an important role in the structure of Indonesia's economy but often face obstacles in accessing financing. The KUR program was introduced by the government as a solution to expand credit access for eligible but unbankable MSME actors. This research employs a descriptive method with a qualitative approach, relying on primary and secondary data through literature studies. The findings indicate that BRI's KUR is perceived as effective in improving community welfare, supporting entrepreneurs in developing their businesses, and generating significant social impacts, particularly in the post-pandemic period. The results also show that the KUR program enhances national financial literacy and inclusion. This study recommends increasing MSME literacy regarding the processes and benefits of KUR, as well as conducting continuous evaluations of its implementation to ensure the program's effectiveness.

**Kata Kunci:** MSMEs, People's Business Credit, Bank BRI, Financing, Welfare, Government Policy.

### PENDAHULUAN

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 dengan adanya krisis pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini tentu sangat menjadi sorotan bagaimana pentingnya mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat yang dapat bertahan dalam situasi apapun. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi isu yang menarik untuk dicermati, menurut Anggraini & Nasution (2013) hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain:

1. Saat krisis sector UMKM dapat bertahan sampai saat ini
2. Perhatian pemerintah terhadap sector UMKM masih kurang.
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat berpotensi dalam menyerap

tenaga kerja.

4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun dengan berbagai keterbatasan, UMKM masih diharapkan mampu menjadi tonggak ekonomi Indonesia. Usaha kecil menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar (Juniarti, 2016). Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari system perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Wahyuni, 2022).

Sektor MSM umumnya menggunakan lebih banyak sumber daya alam dan pekerja yang lebih intensif, termasuk bidang pertanian, perkebunan, pemuliaan dan perdagangan (Sari, 2019). Karena karakteristik ini, UMKM sering disebut sebagai aktivitas ekonomi populis di mana produk yang diproduksi digunakan dalam bentuk esensi masyarakat sehari-hari di hampir setiap tingkatan. Sektor Ekonomi MSM dengan jumlah unit bisnis terbesar dalam distribusi unit bisnis: (1) Pertanian, Perawatan Hewan, Kehutanan, Perikanan. (2) Perdagangan, hotel, restoran. (3) Industri pemrosesan. (4) Transportasi dan Komunikasi. (5) Sektor jasa (Kurniawati et al., 2020).

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek. Menurut Wihartanti (2014), ada beberapa factor yang mempengaruhi penyaluran kredit kepada UMKM, antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi Akibat berbagai kendala yang dihadapi, ruang gerak usaha UMKM menjadi terbatas. Menanggapi permasalahan tersebut, pada 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini terbukti memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. KUR membiayai beragam jenis usaha, antara lain di bidang perdagangan, pertanian, komunikasi, kuliner, dan sektor lainnya.

Selain itu, kebijakan pajak yang menarik juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global untuk mendapatkan investasi asing. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu bersaing dengan negara lain dalam menarik minat investasi luar negeri. Dalam konteks ini, kebijakan pajak bisa menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan para investor asing untuk berinvestasi di negara kita. Temuan oleh Knoll dan rekan-rekan (2021) menunjukkan bahwa investasi untuk penelitian dan pengembangan di luar negeri mengalami penurunan, yang menandakan adanya pergeseran penelitian dan pengembangan dalam perusahaan-perusahaan di antara negara-negara tersebut. Dampak dari insentif pajak secara keseluruhan, yaitu kombinasinya dengan pajak dari negara host dan asing, ternyata minimal dan tidak berbeda secara signifikan dari nol. Ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional merespons insentif pajak litbang dengan memindahkan aktivitas penelitian dan pengembangan di antara lokasi-lokasi grup alih-alih meningkatkan total investasi penelitian dan pengembangan mereka. Dengan demikian, kebijakan pajak menjadi alat yang krusial bagi pemerintah untuk mendorong investasi,

memajukan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Namun, pemberian insentif pajak juga memiliki beberapa potensi risiko dan kelemahan. Contohnya, insentif pajak yang berlebihan bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak dan memperlebar defisit anggaran. Selain itu, pemberian insentif pajak dapat memicu persaingan di antara negara dalam menawarkan insentif yang lebih menarik, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dari insentif tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemberian insentif pajak perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui analisis mendalam tentang situasi ekonomi dan sosial masyarakat, serta kepentingan jangka panjang suatu negara. Insentif pajak dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan iklim investasi di suatu negara atau daerah. Insentif pajak merupakan bentuk pengurangan pajak atau penghindaran pajak yang diberikan pemerintah kepada para investor agar mau berinvestasi di wilayah atau sektor tertentu. Menurut House dan rekan-rekannya (2017), meskipun insentif pajak untuk investasi dapat mendorong penumpukan modal, efektivitasnya dalam merangsang kegiatan ekonomi secara keseluruhan—terutama di sektor yang menghasilkan barang modal yang disubsidi—terhambat oleh “kebocoran” dari stimulus ke produsen asing melalui impor barang modal. Untuk itu, pemahaman dan pengukuran antara mekanisme produksi dan pembelian dalam studi ini penting untuk menganalisis pengaruh pajak investasi. Insentif pajak secara khusus meningkatkan produktivitas yang diperkenalkan pada tahun 2014 untuk Usaha Kecil dan Menengah di Jepang (Hosono et al. , 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung baik diperoleh dari buku-buku maupun dari sumber lain yang dapat mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bank Rakyat Indonesia**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan tumbuh kembangnya negeri ini, Bank BRI secara dinamis terus berinovasi untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan layanan perbankan sekaligus tetap konsisten dengan tekad menjadi mitra utama bagi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya (BRI, 2022).

Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama kekuatan Bank BRI. Dengan dukungan pengembangan teknologi informasi dan sistem perbankan yang andal, tenaga kerja yang profesional, pengawasan berjenjang yang menyeluruh, serta pendekatan pemasaran yang selaras dengan karakteristik nasabah mikro namun tetap berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank BRI telah mampu melayani sektor UMKM secara komersial selama lebih dari 30 tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, Bank BRI terus melakukan inovasi dan pengembangan produk serta layanan perbankan. Bank BRI menyediakan pembiayaan untuk berbagai sektor ekonomi, baik untuk keperluan modal kerja maupun investasi,

Perusahaan mikro, kecil dan menengah (MSMS) memainkan peran penting dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Peran strategis UMKM tercermin dalam kendali jumlah pengusaha dan kemampuannya untuk menyerap 96,9%

pekerja nasional dan mempertahankan 60,3% dari PDB. Menurut data BPPS 2017, salah satu inisiatif yang memperluas akses ke UMKM telah diperluas. (Bri, 2022).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). KUR dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui KUR, pemerintah memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha, sehingga risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dapat diminimalisir." Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha rakyat, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih efektif di pasar, baik lokal maupun global.

Landasan hukum dari KUR berakar pada Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap usaha kecil. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, UU ini menekankan pentingnya akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme pelaksanaan KUR, termasuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yang merinci syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.

Tujuan utama dari KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Dengan adanya KUR, diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan memberikan dukungan finansial yang terjangkau, KUR berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Mekanisme KUR melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, bank, dan pelaku usaha. Penerima KUR adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki usaha yang sudah berjalan dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan. Proses pengajuan KUR biasanya melibatkan analisis kelayakan usaha dan pemenuhan dokumen persyaratan. Dengan proses yang relatif sederhana dan bunga yang rendah, KUR menjadi pilihan menarik bagi pebisnis usaha yang ingin mendapatkan modal tanpa harus menghadapi rintangan yang tinggi. Melalui program ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, sehingga mereka dapat berinvestasi dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan daya saing di pasar.

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk pembiayaan yang populer di Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang ditujukan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Penelitian ini berfokus pada Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia.

## **2. Strategi Kebijakan Kredit Dalam Manajemen Bank**

Dalam dunia bisnis yang diisi dengan persaingan kekerasan dan perubahan cepat, strategi adalah komponen kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberhasilan perusahaan. Ini juga berlaku untuk sektor perbankan dan harus dapat bersaing secara adaptif. Siagisch of Sulistiyani (2020) menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah sejumlah

keputusan dan langkah-langkah mendasar oleh manajemen puncak, dan diimplementasikan oleh semua bagian organisasi. Keputusan strategis bertanggung jawab atas tanggung jawab utama manajemen tingkat tinggi. Pendekatan untuk mempersiapkan strategi alternatif adalah penggunaan matriks SWOT. Dalam buku manajemen pinjaman, Yusuf & Mulyono (2018) menjelaskan bahwa SWOT digunakan sebagai metode perencanaan pinjaman berdasarkan pendekatan pasar. Rencana berorientasi pelanggan ini adalah tempat pola pemasaran ditransfer dari pasar penjual ke pasar pembeli (pasar pembeli'). Dalam pendekatan ini, berbagai aspek seperti pola pemasaran, angka kompetitif, perilaku pelanggan, dan fungsionalitas produk adalah pertimbangan utama untuk perencanaan. Setelah menganalisis faktor-faktor tersebut, maka dapat dibuat SWOT analysis, yaitu Strengthness (kekuatan bank dalam menerobos pasar yang dapat diukur dari jumlah cabang sebagai sales force yang dimiliki, jumlah dana yang siap dipasarkan, nasabah debitur yang telah dikuasai, dll), Weaknesses (letak kelemahan dari perkreditan bank yang bersangkutan), Opportunities (letak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar), Threat analysis (siapa saja yang menjadi ancaman persaingan berapa market share yang telah dimiliki yang harus dipertahankan).

### **3. Potensi dan Resiko Penyaluran Kredit**

UMKM merupakan sektor yang berpotensi. Pada ASEAN Economic Community (AEC), UMKM merupakan sektor yang sangat diperlukan untuk mendukung dan menjadi peluang besar untuk memperbesar sayap bisnis pengusaha Indonesia. Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya memberi kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi pengangguran. UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun demikian UMKM bukannya tanpa kendala, UMKM juga memiliki berbagai kendala umum sebagaimana yang diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (Hening, 2013) antara lain kurang permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan, iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Kendala yang utama yang dihadapi oleh UMKM yakni permodalan. Modal merupakan akses utama dalam suatu usaha. Kredit dari perbankan lah yang bisa membantu UMKM dan memberi solusi pada kendala permodalan tersebut. Saat ini sudah banyak kredit/pembiayaan yang dikucurkan untuk UMKM dari perbankan. Kredit Usaha Rakyat merupakan skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi UMKM-K di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable).

### **4. Manfaat Penyaluran KUR BRI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**

Menurut Suryani (2018), KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah di mana sumber utama dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah juga memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70%, sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses. Tahap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diantaranya: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, pemberian keputusan kredit, tahap pencairan kredit. BRI dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dijalankan, salah satunya ialah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Seperti dijelaskan oleh Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional TPAKD dan Silaturahmi Nasional BWM 2019 menargetkan peningkatan

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 325 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target penyaluran KUR ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional, yang mana berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan 2019 Indeks Literasi Keuangan Nasional mencapai 38,03% sedangkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19% (OJK, 2022).

Selain itu, supaya bisa mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang lebih maksimal salah satunya adalah melalui KUR ini. KUR adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Dengan kata lain melalui KUR pemerintah berusaha membantu pengusaha-pengusaha kecil yang unbankable menjadi lebih mudah mendapatkan akses ke lembaga keuangan atau pembiayaan yang terjamin agar usaha yang dimiliki lebih berkembang (OJK, 2022).

Dalam website Kementerian Koordinator Perekonomian (2022) telah dijelaskan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.

BRI dinilai berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), program stimulus pemerintah ini terbukti memperkuat dinamika sosial, khususnya selama masa pandemi. Studi tersebut melibatkan responden dari lima sektor produksi, terdiri atas 50% pelaku usaha mikro, 30% usaha kecil, dan 20% usaha super mikro. Dari sisi geografis, sekitar 57,62% responden berasal dari Pulau Jawa, sementara 2,38% sisanya berasal dari luar Jawa. Peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional tercermin dari dominasi jumlahnya yang mencapai 99,9%. Dari total unit usaha, dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%, serta sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,3% (BPS, 2017).

Telah terbukti menunjukkan bahwa distribusi pinjaman perusahaan (perawatan) orang memiliki dampak besar pada peningkatan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia. Program ini dianggap mendorong pelanggan untuk mengembangkan perusahaan mereka dan mencapai dampak sosial yang signifikan. Melalui Cure, banyak pemain bisnis, yang sebagian besar ditangguhkan ketika Pandemi dapat mempertahankan kegiatan bisnis, mendapatkan penghasilan yang sebagian digunakan untuk mendanai kesehatan anak-anak dan keluarga. Faktanya, Cure adalah sumber modal baru yang memungkinkan Anda melacak aktivitas bisnis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. KUR memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak namun belum bankable, sehingga mendorong peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Persepsi positif pelaku UMKM terhadap program ini memperkuat bukti bahwa KUR berperan sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Selain itu, keberhasilan penyaluran KUR juga dipengaruhi oleh penerapan strategi manajemen perbankan yang tepat, sistem pengawasan yang baik, serta dukungan regulasi pemerintah. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memperkuat kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., & Nasution, N. (2013). *Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Statistik UMKM Nasional*. Jakarta: BPS.
- BRI. (2022). *Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Hosono, K., Takizawa, M., & Tanaka, M. (2023). Productivity Effects of Tax Incentives for SMEs in Japan. *Journal of Economic Policy Studies*.
- House, C., et al. (2017). *The Effects of Tax Incentives on Capital Formation*. National Bureau of Economic Research Working Paper.
- Hening, R. (2013). *Masalah UMKM dan Solusinya di Era Ekonomi Terbuka*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Rakyat.
- Juniarti, E. (2016). *UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Nasional*. Surabaya: Citra Media.
- Knoll, B., et al. (2021). *R&D Investment Responses to Tax Policy Changes: Evidence from Multinational Firms*. OECD Working Paper.
- Kurniawati, D., Sari, A., & Lestari, R. (2020). *Struktur Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. Yogyakarta: Ekopres.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Sari, D. (2019). *Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif UMKM*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Suryani, E. (2018). Dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45–53.
- Sulistiyani, N. (2020). *Manajemen Strategik dalam Dunia Perbankan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, L. (2022). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 5(2), 33–40.
- Wihartanti, D. (2014). Faktor Penghambat Penyaluran Kredit kepada UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(4), 115–127.
- Yusuf, M., & Mulyono, A. (2018). *Manajemen Perkreditan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.